



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.118/M.PPN/HK/08/2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-29/MK.6/WKN.07/KNL.01/2022 tanggal 16 Februari 2022 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan melalui lelang;
- b. bahwa berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 283/25/2022 tanggal 2 Juni 2022, telah dilaksanakan pelelangan atas Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin;
- c. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Lelang Nomor 18/BAST-HL/06/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan Nomor 19/BAST-HL/06/2022 tanggal 28 Juni 2022, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara hasil lelang kepada pemenang lelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Menghapuskan 18 (delapan belas) unit Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Peralatan dan Mesin dengan total nilai perolehan sebesar Rp 4.275.184.644,- (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PPN/
 KEPALA BAPPENAS
 NOMOR KEP.118/M.PPN/HK/08/2022
 TANGGAL 5 AGUSTUS 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN
 YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA
 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Merk/ Type	Jumlah	Nilai Perolehan	Nilai Jual Termasuk Bea Lelang Pembeli
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3010302001	Elevator/Lift	1	31/12/1997	Mitsubishi	1	Rp 304.065.451	
2	3010302001	Elevator/Lift	2	31/12/1997	Mitsubishi	1	Rp 261.165.451	
3	3010302001	Elevator/Lift	3	31/12/1997	Mitsubishi	1	Rp 254.909.201	
4	3010302001	Elevator/Lift	4	31/12/1997	Mitsubishi	1	Rp 335.103.601	
5	3010302001	Elevator/Lift	5	16/12/2005	Mitsubishi	1	Rp 460.756.499	
6	3010302001	Elevator/Lift	6	16/12/2005	Mitsubishi	1	Rp 447.250.333	
7	3050204002	A.C. Sentral	6	09/09/2004	-	1	Rp 159.822.170	
8	3050204002	A.C. Sentral	40	08/11/2011	-	1	Rp 220.149.600	
9	3050204002	A.C. Sentral	41	08/11/2011	-	1	Rp 162.409.500	
10	3050204002	A.C. Sentral	42	08/11/2011	-	1	Rp 208.169.500	
11	3050204002	A.C. Sentral	43	08/11/2011	-	1	Rp 194.639.500	
12	3050204002	A.C. Sentral	44	08/11/2011	-	1	Rp 145.233.000	
13	3050204002	A.C. Sentral	45	08/11/2011	-	1	Rp 129.415.000	
14	3050204002	A.C. Sentral	46	08/11/2011	-	1	Rp 171.490.000	
15	3050204002	A.C. Sentral	47	14/11/2012	-	1	Rp 188.196.000	

16	3050204002	A.C. Sentral	48	14/11/2012	-	1	Rp 163.713.000	
17	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	42	12/12/2011	80 kVa	1	Rp 127.632.671	
18	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	45	30/11/2012	Mitsubishi	1	Rp 341.064.167	
TOTAL						18	Rp 4.275.184.644	Rp 728.075.998

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati